

PENINGKATAN KAPASITAS (*CAPACITY BUILDING*) APARATUR PEMERINTAHAN DESA KOTA KAPUR KABUPATEN BANGKA

Darus Altin

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung

ABSTRAK

Salah satu indikator keberhasilan suatu desa adalah dilihat dari kemampuan aparatur desanya dalam mengelola pembangunan. Desa Kota Kapur yang merupakan sebuah desa yang masih dipandang minimnya sentuhan pembangunan khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur desa.

Jumlah aparatur Desa Kota Kapur yang berjumlah 20 orang menjadi bagian dari tugas dan fungsi masing-masing yang ada pada Pemerintahan Desa tersebut. Ada yang bertugas menjalankan roda administrasi, keuangan, organisasi dan lain sebagainya. Masing-masing tentunya memerlukan sebuah peningkatan keahlian pada bidangnya tersebut. Untuk itu, perlu disentuh dengan sebuah pembekalan kapasitas dalam bidang tertentu seperti; kemampuan dalam bidang komputer, akuntansi, administrasi dan manajemen organisasi, peraturan desa dan pembuatan peta wilayah desa untuk mempersiapkan Desa Kota Kapur menjadi Desa Siap Pariwisata.

Adapun capaian kegiatan KKN Angkatan pada Desa Kota Kapur adalah tercapainya Aparatur Desa yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer, mampu dalam pengelolaan Akuntansi dan Keuangan Desa, mampu dalam pengelolaan administrasi, mampu dalam membuat dan merancang Peraturan Desa serta dibuatkannya Peta Desa yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dari kegiatan KKN ini diharapkan agar aparatur Desa Kota Kapur lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi SDM dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan yang terstruktur dan sistematis dengan menggunakan sarana, dan prasarana yang ada dalam mendukung kinerja keuangan, lebih memperhatikan kelengkapan data keuangan untuk penyusunan laporan pembukuan agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Dalam bidang sipil yang diaplikasikan sehingga memperjelas

mengenai tapal batas antar desa dan memperbaiki tata ruang desa., tercapainya tata kelola admintrasi desa agar tercapai sistem pemerintahan desa yang efektif dan efisien, dan diharapkan Pemda Kabupaten Bangka bekerjasama dengan pemerintah desa kota kapur memberikan perhatian lebih terhadap desa kota kapur terkait situs sejarah yang terdapat di desa tersebut. Dimana hal tersebut merupakan salah satu aset yang sangat berharga yang tidak dimiliki oleh semua wilayah di Bangka Belitung.

Kata kunci: keuangan desa, administrasi, peta desa, peraturan desa, pelatihan komputer

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tugas yang diemban Pemerintah Desa adalah membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD. Dalam mengemban tugas tersebut banyak permasalahan yang dihadapi oleh aparatur. Aparatur yang kuat tentunya dibekali dengan kemampuan yang selaras dengan tugas yang ada.

Desa kota kapur merupakan salah satu desa dengan potensi yang

luar biasa terutama pada sektor pariwisata sejarah. Kondisi ini didukung dengan adanya sebuah Prasasti Kota Kapur yang menjadi modal besar mendorong pariwisata untuk masuk. Menghadapi kondisi pada masa yang akan datang, masyarakatnya pun harus berbenah dengan dimotori oleh Aparatur yang memiliki kapabilitas dan kapasitas yang baik dalam melaksanakan tugas terhadap masyarakat.

Kapasitas Aparatur Desa Kota Kapur menjadi bagian dari tugas dan fungsi masing-masing yang ada pada Pemerintahan Desa tersebut. Ada yang bertugas menjalankan roda administrasi, keuangan, organisasi dan lain sebagainya. Masing-masing tentunya memerlukan sebuah peningkatan keahlian pada bidangnya tersebut. Untuk itu, perlu disentuh dengan sebuah pembekalan kapasitas dalam bidang tertentu seperti; kemampuan dalam bidang komputer, akuntansi, administrasi dan manajemen organisasi, peraturan desa dan pembuatan peta wilayah desa untuk mempersiapkan Desa Kota Kapur menjadi Desa Siap untuk Sektor Pariwisata.

METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan KKN Tematik di Desa Kota Kapur dengan menggunakan cara pendampingan langsung dari mahasiswa KKN untuk aparatur desa. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

1. Pelatihan Komputer

Mahasiswa memberikan pelatihan teknis berupa Microsoft Office 2010 (MS. Word, MS. Excell, MS. PowerPoint) secara intensif di Kantor/ Aula Desa Kota Kapur kepada Aparatur Desa.

2. Pendampingan penyusunan Administrasi yang Baik

Mahasiswa mendampingi Aparatur Desa dalam hal menyusun dan merapikan Administrasi (Manajemen Administrasi) serta SOP tertentu seperti pengurusan KTP, Surat Keterangan dll pada Kantor Desa Kota Kapur.

3. Pendampingan penyusunan Akuntansi dan Keuangan Desa

Mahasiswa membantu Aparatur Desa dalam bidang Akuntansi dan Keuangan Desa sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 71 Tahun 2010.

4. Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa

Mahasiswa yang memiliki bidang ilmu hukum dapat mengaplikasikan ilmunya dalam penyusunan Peraturan Desa.

5. Pendampingan Penyusunan Peta Desa

Mahasiswa yang memiliki bidang sipil/Gambar dapat melakukan pembuatan Peta Desa Kota Kapur didampingi unsur masyarakat dan aparatur desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa hasil yang didapat dari kegiatan KKN UBB Tahun 2014 di Desa Kota Kapur adalah sebagai berikut:

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KKN PER BIDANG ILMU, POTENSI PENUNJANG DAN ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

Hasil identifikasi permasalahan KKN per bidang ilmu, potensi penunjang, dan alternatif pemecahan masalah dirinci sebagai berikut:

A.1 BIDANG ILMU AKUNTANSI

1. Permasalahan KKN:

- a) Pencatatan pembukuan keuangan desa belum sepenuhnya mengacu pada peraturan bupati yang telah ditentukan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- b) Tidak adanya pemisahan pencatatan asset dan kewajiban.
- c) Tidak adanya pemisahan pencatatan pajak PPN dan PPH
- d) Pencatatan keuangan desa yang masih menggunakan sistem manual
- e) Minimnya kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan

2. Potensi Penunjang

Tersedianya buku pedoman peraturan bupati tentang keuangan desa tahun 2014.

3. Alternatif Pemecahan Masalah

Mengadakan pelatihan pencatatan pembukuan keuangan dan pelatihan komputer terhadap aparatur pemerintah desa kota kapur.

A.2 BIDANG ILMU MANAJEMEN

1. Permasalahan KKN

- a) Tata administrasi desa yang belum dilaksanakan dan organisasi yang belum tertata dengan baik.
- b) Dalam urusan administrasi: Ketidaktepatan waktu dan tempat pengantaran KTP, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha, dan Surat Keterangan Kurang Mampu.
- c) Kurangnya koordinasi antar lembaga dan perangkat desa.
- d) Belum tersedianya struktur organisasi perangkat desa dan masih terdapat beberapa kekurangan yaitu seperti

belum terdapatnya bagan struktur dari organisasi BPD, PKK, dan Karang Taruna

- e) Dalam hal surat menyurat belum tertata dengan baik. Tidak ada pemisahan antara surat masuk dan surat keluar, serta dokumen pemerintahan desa yang tidak terdokumentasi dan tersusun dengan baik.

2. Potensi Penunjang

Adanya peraturan pemerintah tentang tugas pokok dan fungsi perangkat desa

3. Alternatif Pemecahan Masalah

- a) Mengadakan sosialisasi tugas dan fungsi perangkat desa.
- b) Melakukan pembuatan struktur organisasi masyarakat yang selama ini belum terbentuk.

A.3 BIDANG ILMU TEKNIK SIPIL

1. Permasalahan KKN

- a) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.
- b) Belum ada peta yang legal dari instansi pemerintah tentang peta desa kota kapur
- c) Belum ada pembaharuan terhadap peta yang telah dibuat secara manual.
- d) Belum ada penegasan terkait dengan tapal batas wilayah yang berbatasan langsung dengan desa penagan.
- e) Penataan ruang desa yang tidak tertata dengan rapi

2. Potensi Penunjang

Tersedianya panduan pembuatan peta desa dari perangkat desa kota kapur.

3. Alternatif Pemecahan Masalah

- a) Pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS (Global Positioning System).

- b) Mekanisme pengambilan titik koordinat yaitu dengan menelusuri ruas-ruas jalan yang ada di desa yang bersangkutan.
- c) Titik koordinat diambil setiap jarak 10 meter.
- d) Data titik koordinat yang telah diambil menggunakan GPS kemudian diplotkan atau dimasukkan ke komputer.

A.4 BIDANG ILMU HUKUM

1. Permasalahan KKN

- a) Belum ada Peraturan Desa mengenai Izin Pengelolaan Lahan, sehingga tidak menemukan proses penyelesaian mengenai pengelolaan lahan.
- b) Belum adanya peraturan yang mengatur tentang kehidupan dan tingkah laku masyarakat
- c) Tidak adanya pengaturan mengenai izin pengelolaan lahan, meliputi
- d) Tidak ada peraturan secara tertulis antara Desa dan pengusaha dibidang tambang dan penguasaan lahan untuk kepentingan pengusaha dengan tujuan yang menguntungkan sepihak dan merugikan masyarakat Desa Kota Kapur.
- e) Tidak adanya data otentik mengenai batasan-batasan lahan yang dimiliki masyarakat Desa Kota Kapur yang menimbulkan terjadinya sengketa mengenai lahan dikemudian hari.
- f) Sering terjadinya perjanjian dibawah tangan antara masyarakat Desa Kota Kapur dengan pengusaha mengenai penggunaan lahan

2. Potensi Penunjang

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai acuan dan/atau dasar dalam pembentukan rancangan peraturan desa.

3. Alternatif Pemecahan Masalah

- a) Mencari permasalahan yang dihadapi oleh Aparatur Desa mengenai Izin Pengelolaan Lahan.
- b) Membantu BPD dan Kepala Desa membuat Rancangan Peraturan Desa mengenai Izin Pengelolaan Lahan

B. HASIL KEGIATAN

B.1 BIDANG ILMU AKUNTANSI

Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan komputer bagi Aparatur Desa Kota Kapur dan memberikan masukan terkait penyusunan keuangan dan pencatatan Akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



B.2 BIDANG MANAJEMEN

Hasil berupa struktur organisasi desa dan penataan file-file dokumen Bindex File



B.3 BIDANG TEKNIK SIPIL

Dari gambar di atas terlihat bagaimana kondisi peta lama yang ada pada Desa Kota Kapur sehingga apa yang dilakukan mahasiswa Teknik Sipil pada KKN Kota Kapur sampai diserahkan Peta Desa hasil dari penggunaan alat GPS.



B.4 BIDANG ILMU HUKUM

Hasil pada bidang ilmu adalah hukum pengelolaan lahan dibuat dalam suatu Draft rancangan Peraturan Desa dimana aturan tersebut mengenai pengelolaan jenis lahan, izin pengolahan lahan, pengelolaan lahan, pembinaan lahan dan pengawasan serta sanksi administrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari bidang akuntansi bahwa pembukuan yang ada di pemerintahan Desa Kota Kapur sudah cukup baik.
2. Program “Penataan organisasi dan administrasi” telah berjalan dengan sukses. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas aparatur Desa Kota Kapur melalui program penataan administrasi dan organisasi yang telah kami laksanakan.
3. Bahwa sampai saat ini desa kota kapur belum mempunyai peraturan desa yang dibuat oleh Aparatur Pemerintah Desa, maka sesuai dengan program Kuliah

Kerja Nyata Tematik Fakultas Hukum diberikan tugas untuk membantu aparatur pemerintah desa dalam merancang dan menyusun peraturan desa yang dibutuhkan oleh Aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat, guna membangun kesadaran kesadaran hukum aparatur pemerintah desa kota kapur.

4. Pada bidang ilmu teknik sipil, disimpulkan bahwa Desa Kota Kapur terletak di kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu desa yang perlu penetapan dan penegasan kembali terkait dengan batas desa terutama sebelah selatan. Desa ini mempunyai luas wilayah 18,38 km².

B. Saran

1. Desa Kota Kapur lebih Mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi SDM dan sarana prasarana dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan yang terstruktur dan sistematis.
2. Desa Kota Kapur dapat memperjelas mengenai tapal batas antar desa dan memperbaiki tata ruang desa.
3. Desa Kota Kapur dapat merapikan tata kelola admintrasi desa agar tercapai sistem pemerintahan desa yang efektif dan efisien.
4. Agar Pemerintah Kabupaten Bangka bekerjasama dengan pemerintah desa kota kapur memberikan perhatian lebih terhadap desa kota kapur terkait situs sejarah yang terdapat di desa tersebut. Dimana hal tersebut merupakan salah satu aset yang sangat berharga yang tidak dimiliki oleh semua

5. wilayah di Bangka Belitung dan dapat menjadi prioritas Program KKN Tematik tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Bangka Dalam Angka 2013. BPS Kabupaten Bangka.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

SAP No. 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saparin. 2010. “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”,

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. UGM. 2010

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009. Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Revisi rencana tata ruang wilayah daerah